

# IMAN DAN PERWUJUDAN MASYARAKAT YANG ADIL TERBUKA SERTA DEMOKRATIS

Oleh Nurcholish Madjid

Dalam membicarakan kaitan antara iman kepada Allah, Tuhan Yang Mahaesa, dan usaha mewujudkan masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, pertanyaan mendasar yang muncul pertama-tama ialah, apakah memang ada korelasi antara iman dan suatu bentuk tatanan masyarakat tertentu? Atau lebih tegas lagi, benarkah iman menuntut konsekuensi usaha mewujudkan pola kehidupan sosial dan politik tertentu, yang sejalan dengan makna iman itu sendiri?

Jika kita menganggap adanya korelasi itu “*taken for granted*”, pertanyaan tersebut menjadi tidak relevan. Namun, tidak bisa tidak, kita harus melihat apa yang menjadi keharusan menurut ajaran (doktrin), dan bagaimana kenyataannya dalam sejarah, atau sebaliknya.

Orang-orang Muslim, seperti juga biasanya komunitas yang lain, biasa melihat masa lampainya dalam lukisan yang ideal atau diidealisasikan. Tetapi barangkali berbeda dengan komunitas lain, orang-orang Muslim di zaman modern bisa melihat banyak dukungan kenyataan historis untuk memandangi masa lampau mereka dengan kekaguman tertentu. Ini tidak berkenaan dengan seluruh masa lampau Islam, tetapi terutama berkenaan dengan masa lampau yang dalam literatur keagamaan Islam sering disebut masa *Salaf* (Klasik), atau, lengkapnya, *al-Salaf al-Shālih* (Klasik yang Saleh). Juga disebut masa *al-Shadr al-Awwal* (Inti Pertama),

yang terdiri dari masa Rasulullah saw., para Sahabat Nabi dan para *Tābi‘ūn* (Pengikut).

Dari sudut pandangan keagamaan, menarik sekali untuk memperhatikan bahwa generasi Islam pertama itu semuanya dijamin masuk surga.<sup>1</sup> Apa pun hakikat makna firman Ilahi itu, jelas ia juga bermakna penegasan tentang tingkat kesalehan mereka sebagai perorangan maupun komunitas. Dan di samping mereka itu, sering ditambahkan pula generasai para *Tābi‘ al-Tābi‘īn* (Pengikut para Pengikut).

Maka, kepada generasi pertama itulah kita harus berusaha mencari bahan-bahan historis untuk otentifikasi suatu pandangan keagamaan, termasuk pandangan keagamaan yang memancar dalam tatanan kehidupan sosial, seperti keadilan, keterbukaan, dan demokrasi.

## Masa Klasik Islam

Pengertian kebanyakan orang Muslim kepada masa klasik Islam (Salaf) itu telah banyak tercampur dengan unsur-unsur pandangan yang terbentuk dalam sejarah. Karena itu bisa tidak murni lagi, dan masa klasik itu justru perlahan-lahan tumbuh menjadi semacam *terra incognita*. Tetapi jika diperlukan contoh nyata kaitan antara iman dan tatanan pergaulan hidup bersama yang mendekati keadaan ideal dalam Islam, kiranya mencoba memahami masa klasik itu adalah cara yang terbaik.

Sebagai generasi yang “dijamin masuk surga”, masa klasik itu tentulah mendukung nilai-nilai yang berkenan pada Tuhan. Jadi dapat dipandang sebagai masyarakat yang merealisasikan ajaran dan cita-cita berdasarkan iman. Ini mengandung logika, karena masa itu

---

<sup>1</sup> Q 9:100, “Dan para perintis pertama, yang terdiri dari kaum *Mubājirūn* dan *Anshār* serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah *ridlā* akan mereka dan mereka pun *ridlā* akan Dia. Allah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di sana selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang agung.”

adalah masa Nabi dan masa generasi yang terdekat kepada Nabi. Dari segi keimanan sendiri, adalah *absurd* jika cita-cita berdasarkan iman itu tidak terwujud di masa Nabi atau masa-masa terdekat kepada masa beliau.

Tinjauan dan penilaian modern terhadap masa klasik Islam diberikan oleh Robert N. Bellah, seorang ahli sosiologi agama yang terkenal. Karena tinjauan dan penilaiannya itu amat menarik dan terkait erat dengan pokok pembicaraan kita ini, di sini disajikan kutipan panjang dari Bellah:

... There is no question but that under Muhammad, Arabian society made a remarkable leap forward in social complexity and political capacity. When the structure that took shape under the prophet was extended by the early caliphs to provide the organizing principle for a world empire, the result is something that for its time and place is remarkably modern. It is modern in the high degree of commitment, involvement, and participation expected from the rank-and-file members of the community. It is modern in the openness of its leadership positions to ability judged on universalistic grounds and symbolized in the attempt to institutionalize a nonhereditary top leadership. Even in the earliest times certain restraints operated to keep the community from wholly exemplifying these principles, but it did go closely enough to provide a better model for modern national community building than might be imagined. The effort of modern Muslims to depict the early community as a very type of equalitarian participant nationalism is by no means an unhistorical ideological fabrication.<sup>2</sup>

“... Tidak diragukan lagi bahwa di bawah pimpinan Muhammad, masyarakat Arabia telah membuat lompatan ke depan luar biasa dalam kompleksitas sosial dan kapasitas politik. Ketika struktur

---

<sup>2</sup> Robert N. Bellah, “Islamic Traditions and Problems of Modernization”, dalam Robert N. Bellah, ed., *Beyond Belief* (New York: Harper & Row, edisi paperback, 1976), h. 150-151.

yang telah mulai terbentuk di bawah pimpinan Nabi kemudian dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk menyediakan dasar penyusunan emperium dunia, hasilnya ialah sesuatu yang untuk masa dan tempatnya luar biasa modern. Ia modern dalam hal tingkat komitmen, keterlibatan, dan partisipasi yang tinggi, yang diharapkan dari semua lapisan anggota masyarakat. Ia modern dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinannya terhadap kemampuan yang dinilai menurut ukuran-ukuran universal, dan dilambangkan dalam usaha untuk melembagakan kepemimpinan puncak yang tidak bersifat warisan. Meskipun pada saat-saat permulaan beberapa kendala tertentu muncul untuk menghalangi komunitas (Muslim) dari sepenuhnya mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, tapi akhirnya komunitas itu berhasil juga mewujudkan, suatu model bangunan komunitas nasional modern, yang lebih baik daripada yang bisa dibayangkan. Usaha orang-orang Muslim modern untuk melukiskan komunitas (Islam) pertama itu sebagai contoh sesungguhnya bagi nasionalisme partisipan yang egaliter itu sama sekali bukanlah suatu fabrikasi ideologi yang tidak ahistoris.

Dengan perkataan lain, sebagai masyarakat egaliter lagi partisipatif, masa klasik Islam itu menyerupai benar gambaran sebuah masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis seperti dalam konsep-konsep sosial-politik modern. Sifatnya yang egaliter dan partisipatif itu telah tampak dalam berbagai keteladanan Nabi sendiri.<sup>3</sup> Juga

---

<sup>3</sup> Watak partisipatif dan egaliter masyarakat pimpinan Nabi, di luar masalah-masalah yang termasuk ke dalam lingkup tugas kerasulan (*risālah*) beliau, dapat dilihat dari prinsip musyawarah yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk dilaksanakan. Musyawarah itu beliau lakukan, misalnya, menjelang dan dalam menghadapi Perang Uhud. Beliau berpendapat, sebaiknya bertahan dalam kota, tetapi suara mayoritas, yang datang terutama dari kalangan muda yang sangat antusias karena pengalaman menang dalam Perang Badar, menghendaki menyongsong musuh dari Makkah itu di luar kota. Nabi tunduk kepada suara mayoritas itu; bahkan ketika sebagian dari mereka berubah pendirian, dan ingin kembali pada pendapat Nabi sendiri, Nabi justru menolak dan bertahan kepada keputusan bersama berdasarkan suara mayoritas. (Lihat, Amin Sa'id, *Nasy'at al-*

dalam keteladanan para khalifah yang bijaksana (*al-Khulafā' al-Rāsyidūn*),<sup>4</sup> bahkan masih terasa denyut nadinya sampai kepada

*Dawlah al-Islāmīyah* [Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.], h. 78-79. Juga Muhammad Ahmad Bishmil, *Ghazwat Uhud* [Beirut: Dār al-Kutub, tanpa tahun], h. 78-79.

Masyarakat Madinah, pimpinan Nabi sendiri adalah masyarakat majemuk, yang dipersatukan oleh adanya sebuah ikatan yang terkenal sebagai Perjanjian Madinah. Di situ disebutkan dasar-dasar masyarakat partisipatif, dengan ciri utama kewajiban pertahanan bersama dan kebebasan beragama, antara lain dalam kaitannya dengan masyarakat Yahudi Madinah: “Dan orang-orang Yahudi mengeluarkan biaya bersama orang-orang beriman (Muslim) selama mereka diperangi (oleh musuh dari luar). Orang-orang Yahudi Bani ‘Awf adalah satu umat bersama orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi itu berhak atas agama mereka, dan orang-orang beriman berhak atas agama mereka pula, ... (kemudian disebutkan semua suku Yahudi lain di Madinah yang kedudukannya sama dengan suku Yahudi Bani ‘Awf itu). (Lihat, Muhammad Hamidullah, *Majmū‘at al-Watsā‘iq al-Siyāsīyah* [Kumpulan Dokumentasi Politik], (Beirut: Dar al-Irsyad, 1389 IV 1969 M), h. 44-45; dan Ibn Ishāq, *Sīrah Rasūl-u ‘l-Lāh* [Biografi Rasulullah], diterjemahkan oleh A. Guillaume, *The Life of Muhammad* [Karachi: Oxford University Press, 1980], h. 233). Lihat juga Amin Sa‘id, h. 28-29. Berkenaan dengan ini Amin Sa‘id mengatakan bahwa perjanjian itu mengandung makna pengukuhan solidaritas sesama orang beriman (Muslim), antara lain jalinan solidaritas dan saling mencintai antara kaum beriman dan orang-orang Yahudi, serta kedudukan Madinah sebagai negeri yang aman dan bebas untuk kedua golongan itu. Maka berdasarkan perjanjian itu, dalam menghadapi Perang Uhud Nabi menyeru orang-orang Yahudi untuk menyertai mereka menghadapi musuh. Tetapi mereka tidak bersedia, dengan alasan bahwa peperangan itu jatuh pada hari Sabtu, hari suci mereka. Nabi pun tidak memaksa mereka. Namun ada seorang Yahudi bernama Mukhayriq yang tetap berpartisipasi dalam pertahanan Madinah itu, bahkan kemudian tewas dalam pertempuran, dan mewasiatkan seluruh kekayaannya untuk Nabi. Nabi sangat terharu, dan memujinya dengan kata-kata yang terkenal: “Mukhayriq adalah sebaik-baiknya orang Yahudi.” (Amin Sa‘id, h. 80; dan W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, [Oxford: Clarendon Press, 1977], h. 257 — dikutip dari Hisyam, h. 354 dan al-Waqidi, *Kitāb al-Maghāzī*, terjemahan Welhausen, [*Muhammad in Medina; das ist Vakidi's Kitāb al-Maghāzī in verkürzter deutscher Wiedergabel*, [Berlin, 1882], h. 124).

Karena demikian isi dan semangat perjanjian itu, Rasulullah di Madinah bukanlah seorang penguasa otokratik, melainkan hanya menempati posisi sebagai yang pertama dari yang sama (*first among equals, primus inter pares*). (Montgomery Watt, h. 228-229).

<sup>4</sup> Banyak fakta sejarah tentang sifat egaliter dan partisipatif masyarakat Muslim di masa para *al-Khulafā' al-Rāsyidūn*. Ini bisa dilihat antara lain dalam

masa-masa selanjutnya yang cukup jauh, seperti masa Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz dari Dinasti Umawi,<sup>5</sup> dan masa Khalifah al-Qadir

---

cara-cara para khalifah itu membuat keputusan (*decision making process*), seperti dituturkan oleh Shaykh Muhammad al-Hudlari Beg: “Kedua pemimpin senior (*al-syaykhān*, yakni, Abu Bakr dan Umar) itu, bila mengajak musyawarah sekelompok orang, mereka mengajukan suatu pendapat yang diikuti umum dan tidak ada seseorang yang menyalahinya. Cara mengemukakan pendapat seperti ini disebut konsensus (*ijmāʿ*).” Suatu kali Abdullah ibn Abbas bertanya kepada Zayd ibn Tsabit mengenai suatu ketentuan tentang harta waris: “Adakah dalam Kitab Allah ketentuan mengenai sepertiga yang tersisa?” Dijawab oleh Zayd ibn Tsabit, “Aku mengikuti pendapatku, dan kau boleh mengikuti pendapatmu.” Suatu ungkapan standar dari para khalifah masa itu, kapan saja mereka membuat keputusan di luar yang tegas ditentukan oleh Kitab Suci dan Sunnah Nabi, ialah seperti dikatakan oleh Abu Bakr: “Ini pendapatku. Jika pendapat itu benar, ia berasal dari Tuhan, dan jika salah maka ia datang dari diriku sendiri, dan aku akan mohon ampun kepada Tuhan.” Karena semangat itu maka ketika Umar menerima surat dari seseorang dan di dalamnya tertulis ungkapan, “Inilah pendapat Tuhan dan pendapat Umar”, Umar pun membalas, “Buruk amat yang kau katakan itu”. Aku berkata, “Inilah pendapat Umar: jika benar maka datang dari Tuhan dan jika salah maka datang dari Umar sendiri.” Umar juga menegaskan, “Sunnah (ketetapan yang sah) ialah yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu jadikan pendapat yang salah sebagai sunnah untuk umat,” (al-Syaykh Muhammad al-Hudlari Beg, *Tārīkh al-Tasyrīʿ al-Islāmī* [Beirut: Dār al-Fikr, 1387 H/1967], h. 96-97).

Karena itu, menurut Muhibbuddin al-Khathib, dalam deskripsinya tentang masyarakat klasik Islam, berbulan-bulan sejak Umar diangkat sebagai khalifah namun tidak seorang pun datang kepadanya meminta keputusan hukum, karena memang mereka tidak memerlukan keputusan itu sebab mereka adalah anggota suatu masyarakat akhlaki (*etis*), yang salah satu cirinya ialah adanya penghayatan pribadi yang mendalam akan makna kebenaran dan rasa keadilan. (Muhibbuddin al-Khathib, *al-Jayl al-Matsalī* (sebagai makalah penutup edisinya untuk kitab *al-Muntaqā min Minhāj al-ʿidāl* oleh Muhammad ibn Utsman al-Dzahabi [Damaskus: Maktabat Dār al-Bayān, 1374 H], h. 569).

<sup>5</sup> Pergantian dari masa *al-Khulafāʾ al-Rāsyidūn* ke masa Dinasti Umawi dipandang oleh Robert N. Bellah sebagai kegagalan sistem Islam yang menghendaki pemilihan pimpinan politik tertinggi secara terbuka dan demokratis, dan berubah menjadi sistem penunjukan atau yang menyerupai itu secara tertutup dan otoriter. Bellah mengatakan bahwa kegagalan itu terjadi karena prasarana sosial untuk mendukung sistem Islam yang “modern” saat itu belum ada. (Bellah, h. 151). Namun dari para khalifah Umawi itu, Umar ibn Abd al-Aziz (memerintah 97-100 H/717-720 M, juga sering disebut Umar

Billah dari Dinasti Abbasi pada saat-saatnya yang terakhir sebelum mengalami kehancuran.<sup>6</sup>

II — Umar I ialah Umar ibn al-Khaththab) dianggap sebagai khalifah yang paling saleh. Dalam suasana berkecamuknya berbagai fitnah akibat fanatisisme politik dan keagamaan kelompok (sekte), Umar II berjasa dengan usahanya mengakhiri kebiasaan pada orang-orang Muslim untuk saling mengutuk, khususnya antara kaum Umawi dan kaum Syi'i (pengikut Ali). Umar II berusaha menegakkan kembali prinsip-prinsip keadilan dan persamaan manusia, dan banyak membuat koreksi terhadap para pendahulunya dari kalangan penguasa Umawi. Bahkan ia sebenarnya menganut pandangan mengenai kekhalifahan seperti pandangan kaum Khawarij, yakni bahwa kekhalifahan harus dipilih secara terbuka dan demokratis dengan diserahkan kepada rakyat umum. Karena itu ia merencanakan untuk membuat pemilihan bebas itu, dengan mencalonkan seseorang yang paling memenuhi syarat, di luar kalangan Bani Umayyah sendiri. Namun keinginan Umar II itu tidak terwujud, karena ia wafat setelah menjabat kekhalifahan selama hanya dua tahun. (Al-Hudlari Beg, h. 112).

<sup>6</sup> Seperti halnya dengan Dinasti Umawi, yang mendasarkan diri pada sistem kesukuan Arab pra-Islam dengan campuran unsur Hellenis, Dinasti Abbasi yang banyak mengambil sistem pemerintahan Persia juga tidak bersifat terbuka, malahan banyak petunjuk tentang adanya praktik-praktik despotik dalam kekuasaannya. Walaupun demikian, jelas karena faktor ajaran Islam jiwa partisipatif dan egaliter dari masa klasik masih terasa gelombangnya, seperti dicontohkan oleh suatu peristiwa *anecdotal* berkenaan dengan khalifah Abbasi al-Qadir Billah Ahmad ibn al-Muqtadir (sekitar tahun 1000 M), salah seorang dari empat khalifah terakhir yang tidak lagi memiliki kekuasaan namun masih menduduki fungsi simbolik bagi umat. Seorang dari kalangan Syi'ah al-Syarif al-Ridla, penghimpun kitab *Nahj al-Balāghah* oleh Ali, menulis sebuah puisi untuk Khalifah:

Maafkanlah, wahai Amir al-Mu'minin, sesungguhnya kita dalam puncak pohon kemuliaan tidaklah berbeda.

Di saat-saat kemegahan, tiada paut sedikit pun antara kita, kita sama-sama berakar pada asal-usul yang mulia.

Hanya kekhalifahan telah menjadi kelebihanmu, sedang aku lepas daripadanya, dan engkaulah yang terpedaya.

Terhadap puisi sindiran itu al-Qadir menjawab: Aku inginkan kemuliaan, namun kemuliaan itu mengingkariku, dan selamanya lah si tercinta mengingkari si pecinta. Namun aku tabah hingga kuperoleh kemuliaan itu, dan tak kukatakan,

'Pergi!' Hanya istri pembenci harus didera. (Lih. al-Syaykh Muhammad Abduh, dalam mukaddimah untuk penerbitan kitaba *Nahj al-Balāghah* himpunan al-Syarif al-Ridlā [Beirut: Dār al- Fikr, tanpa tahun], h. 6-7).

## Iman dan Prinsip Keadilan

Keterkaitan iman dengan prinsip keadilan tampak jelas dalam berbagai pernyataan Kitab Suci, bahwa Tuhan adalah Mahaadil, dan bagi manusia perbuatan adil adalah tindakan persaksian untuk Tuhan.<sup>7</sup> Karena itu menegakkan keadilan adalah perbuatan yang paling mendekati takwa atau keinsafan ketuhanan dalam diri manusia.<sup>8</sup>

Keadilan, yang dalam Kitab Suci dinyatakan terutama dengan istilah-istilah *'adl* dan *qisth*, seperti dikatakan oleh Yusuf Ali adalah suatu istilah yang serba-meliputi, yang bisa mencakup semua jenis kebaikan dalam pemikiran kefilosofatan. Tetapi karena akarnya yang jauh dalam rasa ketuhanan atau takwa, keadilan berdasarkan iman menuntut sesuatu yang lebih hangat dan manusiawi daripada konsep keadilan formal dalam sistem hukum Romawi, bahkan lebih jauh menembus dinding-dinding pengertian keadilan yang rumit dalam spekulasi kefilosofatan Yunani. Rasa keadilan berdasarkan iman harus menyatakan ke luar detik hati nurani yang paling mendalam. Keadilan imani itu terkait erat dengan *ih̄sān*, yaitu keinginan berbuat baik untuk sesama manusia semurni-murninya dan setulus-tulusnya,

---

<sup>7</sup> “Wahai sekalian orang beriman, jadilah kamu sekalian orang-orang yang teguh untuk keadilan sebagai saksi-saksi Tuhan, meskipun mengenai diri kamu sendiri, kedua orangtuamu atau pun sanak kerabatmu, dan biar pun dia itu kaya atau miskin, sebab Tuhan lebih mampu melindungi mereka (melalui keadilanmu). Maka janganlah kamu menurutkan hawa nafsu untuk berbuat keadilan itu. Dan jika kamu menyimpang atau enggan, sesungguhnya Tuhan benar-benar mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan,” (Q 4:135).

<sup>8</sup> “Wahai sekalian orang yang beriman, berdirilah tegak untuk Tuhan, sebagai saksi-saksi dengan menegakkan keadilan. Dan janganlah sampai kebencian suatu kelompok manusia menyimpangkan kamu sehingga kamu menjadi tidak adil. Tegakkanlah keadilan, itulah yang paling mendekati takwa. Sesungguhnya Tuhan benar-benar mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan,” (Q 5:8). Seperti halnya firman yang dikutip terdahulu, usaha menegakkan keadilan, yang dalam firman-firman itu diungkapkan dalam kata-kata Arab *al-qisth*, lebih-lebih diperintahkan dalam situasi seseorang tidak netral, seperti situasi berurusan dengan orang-orang yang dicintai (diri sendiri, orangtua, atau kerabat), atau orang-orang yang dibenci (musuh, misalnya).



karena kita bertindak di hadapan Tuhan untuk menjadi saksi bagi-Nya, yang di hadapan-Nya itu segala kenyataan, perbuatan dan detik hati nurani tidak akan pernah dapat dirahasiakan.<sup>9</sup>

Pengertian adil (*'adl*) dalam Kitab Suci juga terkait erat dengan sikap seimbang dan menengahi (*fair dealing*), dalam semangat moderasi dan toleransi, yang dinyatakan dengan istilah *wasath* (pertengahan).<sup>10</sup> Muhammad Asad menerangkan pengertian *wasath* itu sebagai sikap berkeseimbangan antara dua ekstremitas serta realistis dalam memahami tabiat dan kemungkinan manusia, dengan menolak kemewahan maupun asketisme berlebihan. Sikap seimbang itu memancar langsung dari semangat *tawhīd* atau keinsafan mendalam akan hadirnya Tuhan Yang Mahaesa dalam hidup, yang berarti antara lain kesadaran akan kesatuan tujuan dan makna hidup seluruh alam ciptaan-Nya.<sup>11</sup> Sikap itu penting guna melandasi tugas orang-orang beriman untuk menjadi saksi atas sekalian umat manusia. Dengan sikap berkeseimbangan itu kesaksian bisa diberikan dengan adil, karena dilakukan dengan pikiran tenang dan bebas dari sikap berlebihan. Seorang saksi tidak bisa mementingkan diri sendiri, melainkan, dengan pengetahuan yang tepat mengenai suatu persoalan dan mampu menawarkan keadilan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Ungkapan yang lengkap dalam Kitab Suci tentang keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi konsistensinya kita dapatkan dalam: "Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan (al-'adl) dan kebaikan (al-ihsān); serta memperhatikan para kerabat, dan Dia melarang dari segala yang keji (al-fahsyā') serta yang bertentangan dengan hati nurani (al-munkār), juga dari kedengkian (al-baghy). Dia memberi pengajaran kepadamu, kiranya kamu akan ingat selalu," (Q 16: 90). Untuk tafsir dan komentar yang lebih luas terhadap firman ini lihat Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (London: E. J. Brill, 1980), h. 409, catatan 109; dan A. Yusuf Ali, *The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary* (edisi American Trust Publications untuk Muslim Student's Association, 1977), h. 223, catatan 644 dan h. 681, catatan 2127.

<sup>10</sup> "Dan begitulah Kami (Tuhan) telah menjadikan kamu sekalian umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas umat manusia, dan Rasul menjadi saksi atas kamu ...," (Q 2:143).

<sup>11</sup> Muhammad Asad, h. 30, catatan 118.

<sup>12</sup> Yusuf Ali, h. 57, catatan 143 dan 144.

Mendalamnya makna keadilan berdasarkan iman itu juga bisa dilihat dari kaitannya dengan “amanat” (*amānah*, titipan suci dari Tuhan) kepada umat manusia untuk sesamanya, khususnya amanat berkenaan dengan kekuasaan memerintah.<sup>13</sup> Kekuasaan pemerintahan adalah sesuatu yang tak terhindarkan demi ketertiban tatanan kehidupan manusia sendiri. Sendi setiap bentuk kekuasaan ialah kepatuhan dari orang banyak kepada para penguasa (*ulū al-amr*, bentuk dari *walī al-amr*). Kekuasaan dan ketaatan adalah dua segi dari satu kenyataan. Namun kekuasaan yang patut dan harus ditaati hanyalah yang berasal dari orang banyak dan mencerminkan rasa keadilan karena menjalankan amanat Tuhan. Maka yang pertama-tama harus dipenuhi bagi suatu kekuasaan untuk mendapat keabsahan atau legitimasinya ialah menjalankan amanat itu, dengan menegakkan keadilan sebagai saksi bagi kehadiran Tuhan.<sup>14</sup>

## Iman dan Keterbukaan

Iman kepada Allah, yang menumbuhkan rasa aman dan kesadaran mengemban amanat Ilahi itu, menyatakan diri ke luar dalam

---

<sup>13</sup> “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada mereka (orang banyak, rakyat) yang berhak, dan bila kamu menjalankan pemerintahan atas manusia maka jalankanlah dengan keadilan. Sungguh, alangkah baiknya apa yang diajarkan Allah kepada kamu itu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,*” (Q 4:58).

<sup>14</sup> Langsung terkait dengan firman yang dikutip di atas ialah firman, “*Hai sekalian orang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada para pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berselisih tentang suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Itulah keputusan yang lebih baik dan lebih tepat,*” (Q 4:59). Yusuf Ali mengatakan bahwa setiap kekuasaan, meskipun bukan berdasarkan keagamaan — seperti umumnya sistem kekuasaan di zaman modern ini — tetap dituntut untuk dijalankan di atas landasan kebajikan (moralitas), dan dengan persyaratan serupa itu maka suatu kekuasaan berhak untuk dipatuhi. (Lih. Yusuf Ali, h. 198, catatan 580).

sikap-sikap terbuka, percaya kepada diri sendiri (karena bersandar kepada Tuhan dan karena ketenteraman yang diperoleh dari orientasi hidup kepada-Nya).<sup>15</sup> Dan karena iman mengimplikasikan pemutlakan hanya kepada Tuhan serta penisbian segala sesuatu selain daripada-Nya, maka salah satu wujud nyata iman ialah sikap tidak memutlakkan sesama manusia ataupun sesama makhluk (yang justru membawa syirik), sehingga tidak ada alasan untuk takut kepada sesama manusia dan sesama makhluk itu.<sup>16</sup> Sebaliknya, kesadaran sebagai sesama manusia dan sesama makhluk akan menumbuhkan pada pribadi seorang beriman rasa saling menghargai dan menghormati, berbentuk hubungan sosial yang saling mengingatkan tentang apa yang benar. tanpa hendak memaksakan pendirian sendiri.<sup>17</sup>

Korelasi pandangan hidup seperti itu ialah sikap terbuka kepada sesama manusia, dalam bentuk kesediaan yang tulus untuk menghargai pikiran dan pendapat mereka yang otentik, kemudian mengambil dan mengikuti mana yang terbaik. Karena itu dengan sendirinya seorang yang beriman tidak mungkin mendukung sistem tiranik (*thughyān*), sebab setiap tirani bertentangan dengan

---

<sup>15</sup> “*Sesungguhnya mereka yang berkata, ‘Tuhan kami ialah Allah’, kemudian mantap, maka tiada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka khawatir;*” (Q 46:13). Dan, “*Mereka yang beriman dan merasa tenteram dengan mengingat Tuhan. Ketahuilah, dengan mengingat Tuhan itu hati akan menjadi tenteram,*” (Q 13:28). (Di sini, ingat atau *dzikir* kepada Tuhan, yang dalam Kitab Suci sangat banyak ditekankan untuk dilakukan manusia pada setiap saat dan tempat itu, adalah salah satu perwujudan sikap mengorientasikan hidup kepada-Nya).

<sup>16</sup> “*Mereka (para nabi) itu menyampaikan tugas suci dari Allah serta takut kepada-Nya, dan mereka tidak takut kepada seorang pun selain Allah. Cukuplah Allah sebagai penghitung,*” (Q 33:39).

<sup>17</sup> “*Demi masa, sesungguhnya manusia pasti merugi, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, serta saling berpesan tentang kebenaran dan saling berpesan tentang ketabahan,*” (Q 103:1-3). (Dalam surat pendek yang amat terkenal ini diperjelas hubungan antara iman, perbuatan baik, dan saling menghormati sesama manusia, yang dikaitkan dengan semangat ajaran musyawarah).

pandangan hidup yang hanya memutlakkan Tuhan Yang Mahaesa. Lebih dari itu, sikap terbuka kepada sesama manusia, dalam kedalaman jiwa saling menghargai namun tidak lepas dari sikap kritis, adalah indikasi adanya petunjuk dari Tuhan, karena memang sikap itu sejalan dengan rasa keutuhan atau takwa.<sup>18</sup>

Sikap kritis yang mendasari keterbukaan itu merupakan konsistensi iman yang amat penting karena, seperti dikemukakan tadi, merupakan kelanjutan sikap pemutlakan yang ditujukan hanya kepada Tuhan dan penisbian segala sesuatu selain Tuhan. Maka, demi tanggung jawabnya sendiri, seseorang hendaknya mengikuti sesuatu hanya bila ia memahaminya melalui metode ilmu (kritis),<sup>19</sup> dan bahkan dalam hal ajaran-ajaran suci seperti

---

<sup>18</sup> Tujuan diutusnya para rasul ialah untuk menyampaikan iman kepada Allah dan hanya mengorientasikan hidup (“menyembah”) kepada Dia satu-satu-Nya, dan bersamaan dengan itu untuk menjauhkan manusia dari *thāghūt*, yaitu setiap bentuk obyek ketundukan atau penyembahan (jadi, orientasi hidup) selain Allah, Tuhan yang Mahaesa. Ke dalam kategori *thāghūt* itu ialah kaum tiran, diktator, despot, penguasa totaliter dan otoriter beserta ideologi yang mendasarinya, yang pasti tidak sejalan dengan semangat Ketuhanan Yang Mahaesa dan Perikemanusiaan. Lihat Q 16:36: “*Sungguh Kami (Tuhan) telah mengutus di kalangan setiap umat seorang rasul: ‘Hendaklah kamu sekalian menyembah Tuhan dan jauhilah thāghūt. Di antara mereka ada yang mendapat hidayah dari Allah, dan di antara mereka ada yang pasti mengalami kesesatan. Karena itu mengembaralah di bumi, dan saksikanlah bagaimana akibat mereka yang mendustakan (menolak kebenaran) itu.’*” Makna firman itu menjadi lebih jelas jika dikaitkan pula dengan firman: “*Dan mereka yang menjauhkan diri dari menyembah (tunduk) kepada thāghūt, serta kembali kepada Tuhan, mereka berhak atas kabar gembira. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mau mendengarkan perkataan (pendapat, pikiran, dan yang serupa dengan itu), kemudian mengikuti yang terbaik daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang berakal budi,*” (Q 39:17-18). Menunjukkan keharusan adanya sikap kritis dalam memahami dan menerima, kemudian mengikuti, ide, pikiran, ajaran, dan lain-lain.

<sup>19</sup> “*Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan mengenainya. Sebab sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu semuanya akan dimintai tanggung jawab akan hal itu,*” (Q 17:36).

agama hendaknya ia tidak menerimanya bagaikan orang yang tuli dan buta.<sup>20</sup> Sekalipun agama lebih tinggi daripada akal, karena ia sejalan dengan akal atau tidak bertentangan dengannya, maka agama hendaknya didekati melalui jalan argumen yang masuk akal, dengan metode yang kritis.<sup>21</sup>

Prinsip-prinsip itu tak terpisahkan dari iman. Sebab dengan iman manusia tergerak untuk selalu mendekati nilai-nilai yang terbaik, sebagai jalan mendekati Tuhan (*taqarrub*), dan usaha pendekatan itu berwujud suatu proses terus-menerus tanpa henti, yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kesungguhan (*mujāhadah*) dalam usaha pendekatan kepada Allah dengan menempuh jalan menuju-Nya itulah wujud nyata iman, dan dengan kesungguhan itu manusia mendapat jaminan berada di jalan Tuhan.<sup>22</sup> Proses pencarian jalan menuju Tuhan itu sendiri berarti pola hidup dinamis, yang menuntut kerjasama antarmanusia dalam jiwa ketuhanan dan kebaikan,<sup>23</sup> serta dalam semangat saling membantu mencari yang benar, dan memikul bersama secara tabah beban perjalanan menuju kebenaran itu.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> “Dan mereka (orang beriman) itu, bila diingatkan akan ayat-ayat (ajaran-ajaran Tuhan mereka), mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang tuli dan buta,” (Q 25:73).

<sup>21</sup> “Dan serulah mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan menggunakan hikmah dan tutur yang baik, serta berargumentasilah dengan mereka dengan sesuatu yang lebih baik...,” (Q 16:125). (Ini tentu sesuai dengan prinsip bahwa agama tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, melainkan, dalam kata-kata Muhammad Asad, “the use of reason alone in all religion discussions with adherents of other creeds is fully in tune with the basic categorical injunction, ‘There shall be no coercion in matters of faith [Q 2:256].’” [Lihat Muhammad Asad, h. 416, catatan 149]).

<sup>22</sup> “Dan mereka yang bersungguh-sungguh (*mujāhadah*) di jalan Kami (Tuhan), pasti akan Kami tunjukkan berbagai jalan Kami...,” (Q 29:69).

<sup>23</sup> “... Dan saling membantulah kamu atas dasar kebaikan dan ketuhanan (*takwa*), dan janganlah kamu saling membantu atas dasar kejahatan dan permusuhan...,” (Q 5:2).

<sup>24</sup> Lihat catatan 17 di atas.

## Iman dan Demokrasi

Kiranya menjadi jelas, prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan saling terkait karena keduanya merupakan konsistensi iman dalam dimensi kemanusiaan. Kini akan terlihat pula keterkaitan antara nilai-nilai itu dengan demokrasi, yaitu pengaturan tatanan kehidupan atas dasar kemanusiaan, yakni kehendak bersama.

Jika iman membawa konsekuensi pemutlakan hanya kepada Allah, Tuhan Yang Mahaesa, tidak ada lawan yang lebih prinsipil terhadap iman selain sikap memutlakkan sesuatu selain Tuhan, termasuk sesama manusia. Itulah sebabnya, seperti telah dikemukakan, tirani berlawanan dengan iman, dan seorang beriman dengan sendirinya mengemban kewajiban meruntuhkan tirani, sebagaimana telah menjadi tugas para rasul Tuhan. Termasuk ke dalam jenis tirani itu ialah yang dibangun justru atas nama agama, seperti dalam sistem tatanan hidup teokratik sebagaimana dipahami di Barat (semisal Kerajaan Romawi Suci — *Holy Roman Empire* — di Zaman Pertengahan).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Terdapat berbagai isyarat dalam Kitab Suci bahwa sistem teokratik, yang dipimpin oleh seorang penguasa dengan wewenang keagamaan mewakili Tuhan, adalah tidak sejalan dengan iman. Ini tampak antara lain dalam konteks perintah kepada nabi (dan orang-orang beriman) untuk mencari titik persamaan (*kalimah sawā*) dengan para pengikut Kitab Suci (*ahl-u 'l-Kitāb*) yang lain, dalam paham Ketuhanan Yang Mahaesa, dan janganlah kita mengangkat sesama kita sebagai saingan-saingan Tuhan (“tuhan-tuhan kecil”) sebagaimana dengan jelas diwujudkan dalam sistem teokratik seperti yang dikenal di Barat itu: “Katakan (Muhammad), ‘Wahai para pengikut Kitab Suci, marilah menuju kepada persamaan ajaran antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Tuhan dan tidak pula memperserikatkan-Nya kepada apa pun, dan hendaknya janganlah sebagian kita mengangkat sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Tuhan Yang Mahaesa.’ Kalau mereka menolak (wahai Muhammad), maka katakan olehmu sekalian (orang-orang beriman): ‘Jadilah kamu sekalian sebagai saksi bahwa kami adalah orang-orang yang pasrah (kepada Tuhan),’” (Q 3:64). (Jelas sekali fungsi kaum teokrat memenuhi deskripsi sebagai “saingan Tuhan” (*syarik, nidd*) atau “tuhan-tuhan kecil” (*arbāb*) karena wewenang keagamaan dan kekuasaan suci mereka). Maka Nabi sendiri pun diingatkan Tuhan sebagai bertugas hanya membawa berita dan peringatan,

Iman kepada Allah menuntut agar segala perkara antarmanusia diselesaikan melalui musyawarah, yang dengan sendirinya adalah suatu proses timbal-balik (*reciprocal*) antara para pesertanya, dengan hak dan kewajiban yang sama. Deskripsi mengenai masyarakat orang beriman sebagai masyarakat musyawarah sedemikian mengesankannya bagi orang-orang Muslim pertama, sehingga surat dalam al-Qur'an yang memuat deskripsi itu disebut surat *al-Syūrā* atau *Musyāwarah*. Untuk memperoleh gambaran lebih lengkap tentang prinsip ini dan prinsip-prinsip kaitannya, di sini dikemukakan kutipan firman bersangkutan:

*“Dan mereka itu menyambut (seruan) Tuhan mereka, menegakkan salat, sedangkan segala urusan mereka (diputuskan dalam) musyawarah antara mereka; dan mereka mendermakan sebagian dari harta yang Kami karuniakan kepada mereka. Dan apabila tirani (al-baghy) menimpa mereka, mereka saling membantu (untuk melawannya). Balasan bagi kejahatan ialah kejahatan setimpal, namun barang siapa bersedia memberi maaf dan berdamai, Tuhanlah yang akan menanggung pahalanya. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang zalim (tiran). Dan barang siapa mempertahankan diri setelah dizalimi, mereka itu tidak dapat dipersalahkan. Tetapi yang harus dipersalahkan ialah mereka yang bertindak zalim kepada sesama manusia, dan menjalankan*

---

bukan memaksa: “Maka sampaikanlah peringatan, sebab sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Engkau bukanlah seorang penguasa (yang diberi wewenang memaksa),” (Q 88:21-22). “Kalau seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah setiap orang di bumi, semuanya. Karena itu, apakah engkau memaksa manusia sehingga mereka beriman semua?,” (Q 10:99). Ini semua sejalan dengan prinsip yang terkenal bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama (Q 2:256). Tapi juga berarti suatu penegasan bahwa tak seorang pun di antara sesama makhluk ini yang diberi hak kekuasaan keagamaan. Karena itu teokrasi bertentangan dengan iman yang benar. Apalagi secara historis kekuasaan teokratik seperti yang ada pada Zaman Pertengahan di Eropa adalah sumber despotisme dan kezaliman, yang hanya dapat dipatahkan dengan munculnya Zaman Modern. Dan kekuasaan para khalifah yang bijaksana dalam Islam klasik, bila diteliti, benar-benar, bukanlah kekuasaan teokratik sebagaimana perkataan itu digunakan dan dimengerti di Barat.

*tirani di bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan mendapat siksa yang pedih. Dan barang siapa bersabar dan mau memberi maaf, sungguh ini termasuk keteguhan hati yang terpuji ('azm al-umūr),”* (Q 42:38-43).<sup>26</sup>

Dalam firman itu ditegaskan keterkaitan antara orientasi hidup berketuhanan atau *rabbānīyah* (menyambut seruan Tuhan dan menjalankan salat), memutuskan urusan bersama melalui musyawarah (*syūrā*), keadilan sosial (mendermakan sebagian harta), berjuang bersama melawan tirani, serta dalam keadaan tertentu ketabahan yang terpuji menghadapi tirani itu. Ini bisa dibandingkan dengan firman yang lain:

*“Dan dengan adanya rahmat Allah engkau (Muhammad) bersikap ramah kepada mereka. Seandainya engkau ini bengis dan keras hati, pastilah mereka lari dari sekelilingmu. Karena itu bersikaplah lapang kepada mereka dan mohonkan ampun untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala perkara. Maka jika telah kauambil keputusan, bertawakallah kepada Allah; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal,”* (Q 3:159).<sup>27</sup>

Seperti dikatakan di muka, gambaran masyarakat seperti itulah yang pernah terwujud dalam masa-masa klasik Islam, yang bagi kebanyakan orang Muslim sendiri agaknya telah menjadi *terra*

---

<sup>26</sup> Seperti biasanya, sebuah surat dalam al-Qur'an dinamakan menurut kata-kata, tema, atau isi surat itu yang paling mengesankan pada para pendengarnya, dalam hal ini ialah para pendengar dari kalangan generasi pertama orang-orang Muslim. Maka kenyataan bahwa surah ke-42 ini dinamakan surat *al-Syūrā* menunjukkan adanya kesan mendalam pada generasi pertama Islam itu berkenaan dengan ajaran tentang musyawarah. Ini berarti dapat diduga mereka tidak saja meresapinya, tapi juga menjalankannya dengan penuh ketaatan ajaran yang mereka anggap sangat penting.

<sup>27</sup> Firman ini memuji keterbukaan sikap Nabi, kemudian perintah agar beliau selalu menjalankan musyawarah dan berteguh hati menjalankan hasil musyawarah itu dengan bertawakal kepada Tuhan.



*incognita*. Sejak masa lalu yang jauh, seperti menjadi tema dominan madzhab Hanbali, keadaan masa Salaf itu dirindukan kembali dan diusahakan dihidupkan, namun sebegitu jauh belum juga berhasil. Dapatkah zaman modern menawarkan bahan yang lebih kaya dan luas, dalam hubungannya dengan pengalaman seluruh kemanusiaan, untuk menghidupkan kembali nilai-nilai pergaulan sesama manusia yang luhur, yang entah di mana, dan kapan, pernah terwujud di muka bumi ini, seperti terwujudnya nilai-nilai itu pada kaum Salaf menurut pandangan orang-orang Muslim? [❖]